

**PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP PKK) DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA TERUSAN TENGAH
KECAMATAN TINGGI RAJA
KABUPATEN ASAHAN**

TESIS

OLEH :

**ZERY NIANA PUSPA SARY
241801029**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

**PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP PKK) DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA TERUSAN TENGAH
KECAMATAN TINGGI RAJA
KABUPATEN ASAHAN**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**

OLEH :

**ZERY NIANA PUSPA SARY
241801029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

Nama : Zerry Niana Puspa Sary

N P M : 241801029

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II



Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Adam, SE, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 17 April 2026

Nama : Zerry Niana Puspa Sary

NPM : 2418010029



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si
Sekretaris	: Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Pembimbing I	: Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Pembimbing II	: Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP
Penguji Tamu	: Dr. Indra Muda, MAP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul ***Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan*** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Medan, April 2026



Zery Niana Puspa Sary

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zerry Niana Puspa Sary
NPM : 241801029
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

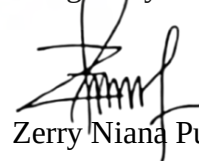
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Zerry Niana Puspa Sary

ABSTRAK

PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TERUSAN TENGAH KECAMATAN TINGGI RAJA KABUPATEN ASAHAN

Nama : Zerry Niana Puspa Sary
NPM : 241801029
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Pembimbing II : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TP PKK memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat yang meliputi peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis. Dalam peran fasilitatif, PKK mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan berbagai program pemerintah. Dalam peran edukatif, PKK aktif memberikan penyuluhan dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Dalam peran representatif, PKK berperan sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pihak terkait. Sedangkan dalam peran teknis, PKK memberikan pendampingan serta keterampilan praktis untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya dukungan dari pihak terkait. Upaya perbaikan yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas kader, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKK. Kesimpulannya, TP PKK memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat desa, namun masih diperlukan upaya penguatan agar peran tersebut dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran PKK, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

**THE ROLE OF THE FAMILY EMPOWERMENT AND WELFARE MOVEMENT
TEAM (TP PKK) IN COMMUNITY EMPOWERMENT
IN TERUSAN TENGAH VILLAGE
TINGGI RAJA SUBDISTRICT
ASAHAN REGENCY**

Name : Zery Niana Puspa Sary
NPM : 241801029
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Supervisor II : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

This study aims to analyze the role of the Family Welfare Empowerment Team (TP PKK) in community empowerment in Terusan Tengah Village, Tinggi Raja District, Asahan Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation involving key informants, main informants, and additional informants. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study indicate that TP PKK plays a significant role in community empowerment, including facilitative, educative, representative, and technical roles. In its facilitative role, PKK acts as a bridge between the community and government programs. In its educative role, PKK actively provides counseling and skills training to the community. In its representative role, PKK conveys community aspirations to relevant stakeholders. Meanwhile, in its technical role, PKK provides assistance and practical skills to improve community independence. However, the implementation of these roles has not been optimal due to several constraints, such as limited resources, low community participation, and insufficient support from related parties. Improvement efforts include strengthening coordination, enhancing the capacity of PKK cadres, and increasing community participation in PKK activities. In conclusion, TP PKK has a strategic role in community empowerment at the village level, but further strengthening efforts are needed to optimize and sustain its role.

Keywords: Role of PKK, Community Empowerment, Village, Community Participation

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari teknik penulisan maupun kedalaman materinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Medan, April 2026
Penulis

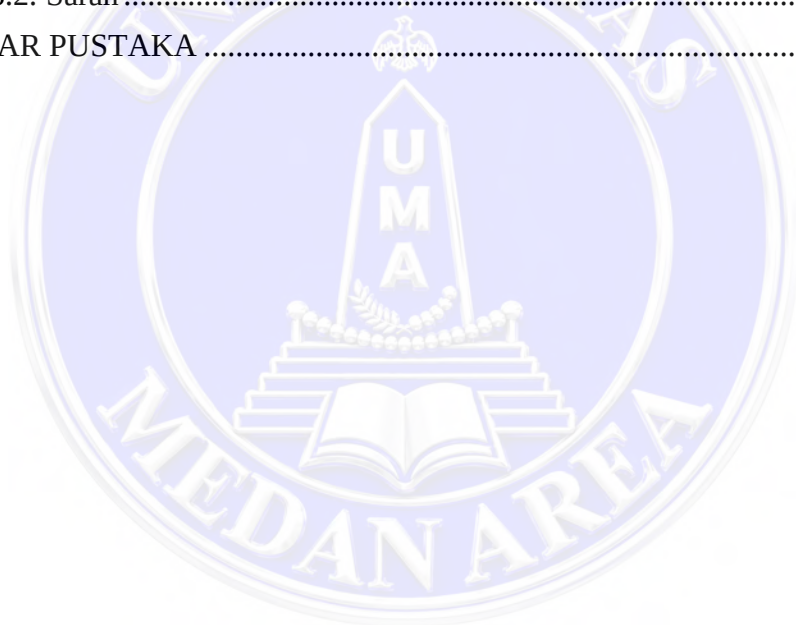


Zerry Niana Puspa Sary

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Masalah	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pemberdayaan Masyarakat.....	8
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. JENIS PENELITIAN	31
3.2. LOKASI DAN JADWAL PENELITIAN.....	31
3.3 Informan Penelitian.....	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data	35
3.5. Teknik Analisis Data.....	37
3.6. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Profil TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan	47
4.1.1. Visi dan Misis TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Desa Terusan Tengah	48
4.1.2. Program Kerja TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Desa Terusan Tengah	49
4.1.3. Kelompok Kerja (Pokja)	51
4.1.4. Struktur Organisasi TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Desa Terusan Tengah	54
4.2. Pembahasan	55

4.2.1. Analisis Peran PKK Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan	55
4.2.2. Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa dalam Mengikuti Lomba-Lomba Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tingkat Kabupaten dan Provinsi	62
4.2.3. Upaya Perbaikan yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Kurangnya Partisipasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa dalam Lomba Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten dan Provinsi.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1 penelitian terdahulu.....	27
Tabel 2 Informan Penelitian.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 2 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	31
Gambar 3 Struktur Organisasi TP PKK Desa Terusan Tengah	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia terbuka saat ini dan memaksa instansi pemerintahan, termasuk pemerintahan desa untuk bersaing disegala bidang dengan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) memiliki peran utama dalam setiap kegiatan serta didukung oleh sarana dan prasarana. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya strategis dalam pembangunan yang berkelanjutan, terutama di tingkat desa. Salah satu aktor yang berperan penting dalam proses ini adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada keluarga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program yang melibatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) suatu organisasi yang berperan besar dalam masyarakat serta dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. Melalui pemberdayaan masyarakat akan terjadi sebuah proses dengan nama orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Dengan hal tersebut pelaksanaan program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sangatlah diperlukan untuk membangun dan membantu kehidupan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat. Dengan melaksanakan 10 program pokok dari organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mencerdaskan masyarakat di desa.

Menurut (Sudarmanto, 2020), pengertian pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok Masyarakat (Zubaedi, 2013).

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan kerlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terdiri dari beberapa bidang lebih dari satunya dalam bidang pengetahuan dan keterampilan serta dibidang ekonomi melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) seperti pembuatan makanan ringan dan kerajinan tangan.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hal ini di karenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan.

Oleh karena itu, sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai program untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuh kembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, Pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Pada era orde baru, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan lembaga kemasyarakatan yang peran dan kiprahnya tidak dipertanyakan lagi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai macam kegiatan keterampilan yang banyak dilakukan mulai dari hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari lingkungan terbawah Rumah Tangga (RT) hingga Desa dan kelurahan. Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan agar secara mandiri mempunyai keterampilan dan keahlian dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup. Oleh karena itu, Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) dibentuk untuk menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Sutedjo dalam Gufran (2015:3) menjelaskan bahwa sasaran gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah Keluarga di pedesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuannya dan kepribadiannya dalam bidang: mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba tuhan, anggota masyarakat dan warga Negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Di Desa Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, keberadaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan

kemandirian. Berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, dan pengembangan usaha mikro, telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Program pelatihan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, khususnya perempuan, dalam menjalankan usaha kecil dan meningkatkan pendapatan keluarga. Penyuluhan kesehatan difokuskan pada peningkatan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, seperti menjaga kebersihan lingkungan, pemenuhan gizi, dan pencegahan penyakit. Pengembangan usaha mikro dilakukan melalui pendampingan dan pemberian modal kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru di desa.

Namun demikian, tingkat keberhasilan program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya dukungan dari pihak terkait. Keterbatasan sumber daya mencakup kurangnya dana operasional, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan program. Minimnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan serta kesulitan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah maupun pihak swasta sering kali belum maksimal dalam membantu keberlanjutan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Terusan Tengah. Dengan memahami peran ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan kontribusi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembangunan masyarakat desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat desa?
2. Apa yang menjadi faktor kurangnya partisipasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa untuk mengikuti lomba-lomba Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat provinsi dan kabupaten?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun Tujuan Masalah Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat desa.
2. Untuk menganalisis faktor kurangnya partisipasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa untuk mengikuti lomba-lomba Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat provinsi dan kabupaten.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Pada Penelitian ini Adalah :

1. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yakni dengan mempelajari apa saja yang menjadi faktor kurangnya partisipasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa untuk mengikuti lomba-lomba Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat provinsi dan kabupaten.
3. Memberi informasi dan masukan dalam menyusun kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
4. Secara teoritis, memperkaya literatur ilmiah mengenai peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.
5. Secara praktis, dapat Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Defenisi Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya konsep “pemberdayaan” dan “memberdayakan” adalah terjemahan dari 8 epres inggris yaitu “empowerment” dan “empower” yang mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah “to give power or authority to” yang artinya sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain (Yansen, 2013).

Disisi lain pemberdayaan atau empowerment berdasarkan makna katanya diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari “dalam” yang dapat diperkuat dengan unsur-unsur dari luar (dalam Kartasamita, 1996:142). Menurut Robert Chamber sebagaimana diikuti oleh Kartasasmita (dalam Azam Awang (2010:45-46) “pemberdayaan” (empowerment) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai 8 epres, konsep ini mencerminkan 8 epresen baru pembangunan yaitu bersifat “*people centered participatory, empowering and sustainable*”. Sedangkan Pemberdayaan menurut Ife (1995:56) adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali potensi yang dimiliki, merencanakan, dan melaksanakan tindakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Ife dan Tesoriero (2008), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol masyarakat atas sumber daya

yang ada, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi secara mandiri.

Proses pemberdayaan melibatkan berbagai tahapan, termasuk penguatan kapasitas individu, kelompok, dan komunitas. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya melibatkan transfer keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga mencakup penguatan rasa percaya diri dan kemampuan untuk membuat keputusan yang mandiri. Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan.

Elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Partisipasi: Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam menentukan solusi terhadap masalah yang dihadapi.
2. Kapasitas: Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat agar mampu mandiri. Hal ini mencakup pendidikan formal maupun non-formal yang relevan dengan kebutuhan lokal.
3. Akses: Memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan peluang, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pasar.
4. Kesenjangan: Mendorong keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

Pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks pedesaan,

pemberdayaan sering kali difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Pemberdayaan Masyarakat di Desa mencakup pembangunan di segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Program-program yang direncanakan dalam Pembangunan Desa seharusnya menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat Desa. Karena masyarakat desanya, maka hendaknya mereka ikut dilibatkan dalam proses pemberdayaan. Pelaksanaan pembangunan desa bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat Desa. Dengan kata lain pembangunan desa mengutamakan kepada prinsip kewajiban yang seimbang dan serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam proses Pembangunan pemberdayaan Masyarakat di Desa.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi Masyarakat sangat diharapkan, karena tanpa adanya partisipasi dari Masyarakat pembangunan akan berjalan lambat dan akan sulit untuk mencapai keberhasilan pembangunan sesuai dengan sasarannya. Oleh karena itu adanya Masyarakat desa akan menentukan keberhasilan Pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat, sebab pada dasarnya masyarakat desa sendiri yang lebih mengetahui hal-hal yang diperlukan desanya. Jadi dalam proses pembangunan masyarakat bukan hanya sebagai obyek melainkan harus pula sebagai subyek pembangunan.

2.1.2 Peranan

Secara teoritis, konsep peran (role) dapat dijelaskan sebagai seperangkat perilaku, tugas, hak, dan kewajiban yang melekat pada suatu posisi atau status sosial tertentu. Menurut Soekanto (2012: 243) Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peranan yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Selanjutnya, menurut Biddle dan Thomas dalam teori peran sosial (Role Theory), peran mencakup beberapa komponen penting, yaitu harapan peran (role expectation), pelaksanaan peran (role performance), serta konflik peran (role conflict). Jika dikaitkan dengan PKK, maka:

1. Harapan Peran (Role Expectation)

PKK diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Harapan ini datang dari pemerintah, masyarakat, maupun organisasi itu sendiri. PKK diharapkan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

2. Pelaksanaan Peran (Role Performance)

Pelaksanaan peran PKK tercermin dalam berbagai kegiatan nyata seperti penyuluhan, pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan melalui posyandu, serta pengembangan usaha ekonomi keluarga. Keberhasilan

pelaksanaan peran ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas kader, dukungan sumber daya, serta tingkat partisipasi masyarakat.

3. Konflik Peran (Role Conflict)

Dalam praktiknya, PKK juga dapat menghadapi konflik peran, misalnya keterbatasan waktu kader yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan anggota masyarakat, atau adanya tumpang tindih program dengan lembaga lain. Konflik ini dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan peran PKK di lapangan.

Selain itu, teori peran juga dapat dilihat dari perspektif struktural-fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Dalam teori ini, setiap lembaga sosial, termasuk PKK, memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sistem sosial. PKK berfungsi sebagai agen sosialisasi, pemberdayaan, dan integrasi sosial yang berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

Teori peran yang dikemukakan oleh Ife & Tesoriero (2008) menjelaskan empat peran penting yang dapat diambil oleh seorang pekerja atau fasilitator dalam menjalankan tugasnya di Masyarakat, yaitu:

1. Peran Fasilitatif

Di mana pekerja 12epres bertindak sebagai fasilitator yang membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Dalam peran ini, pekerja 12epres menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama, berdiskusi, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Tujuan dari peran ini adalah memperkuat kapasitas masyarakat dalam memecahkan masalah

secara mandiri, meningkatkan partisipasi, dan mendorong kolaborasi di antara anggota komunitas.

2. Peran Edukatif

Di mana pekerja 13epres berperan sebagai pendidik. Dalam hal ini, mereka memberikan pengetahuan, informasi, dan keterampilan kepada masyarakat atau kelompok untuk membantu mereka memahami situasi mereka, meningkatkan kesadaran, serta memperkuat kapasitas mereka.

Peran ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan informasi yang relevan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Peran Representatif

Dalam peran ini, pekerja 13 epres bertindak sebagai perwakilan masyarakat, memperjuangkan kepentingan kelompok, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, seperti pemerintah atau lembaga lain. Tujuannya adalah memastikan bahwa suara masyarakat yang kurang terwakili dapat didengar oleh pihak berwenang, sekaligus memfasilitasi hubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan pihak eksternal.

4. Peran Teknis

Dalam peran ini, pekerja 13epres memberikan dukungan teknis yang spesifik berdasarkan keahlian atau keterampilan yang mereka miliki untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu. Peran teknis ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan keterampilan teknis yang tidak mereka miliki agar dapat mengimplementasikan rencana atau proyek dengan lebih efektif.

2.1.3 Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, PKK memiliki posisi strategis karena keluarga menjadi titik awal dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui 10 Program Pokok PKK yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan hidup, PKK berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki beberapa fungsi utama:

1. Sebagai fasilitator: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan dalam membantu masyarakat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Dalam peran ini, PKK tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan kepada masyarakat. PKK juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan berbagai sumber daya yang tersedia, baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta. Dengan demikian, PKK mampu membuka akses masyarakat terhadap berbagai program pembangunan.
2. Sebagai motivator: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Peran ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, inspiratif, dan partisipatif. PKK mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki inisiatif dan kemandirian. Motivasi yang diberikan tidak hanya dalam bentuk dorongan material, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, seperti membangun rasa percaya diri, solidaritas sosial, serta semangat gotong royong.

3. Sebagai pelaksana: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara langsung mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut meliputi pelatihan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi keluarga, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi keluarga, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, PKK menyesuaikan program dengan kondisi dan kebutuhan lokal masyarakat desa, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

Selain itu, Tim Penggerak PKK juga menjalankan peran sebagai perencana, pengendali, dan penggerak kegiatan. Dalam hal perencanaan, PKK menyusun program kerja berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat. Dalam fungsi pengendalian, PKK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kegiatan. Sementara itu, sebagai penggerak, PKK mampu mengorganisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat secara luas.

Struktur organisasi PKK yang terdiri dari empat Kelompok Kerja (Pokja) juga memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Pokja I berfokus pada penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong, yang menjadi landasan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Pokja II berperan dalam bidang pendidikan dan keterampilan, yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pokja III menangani aspek sandang, pangan, perumahan, serta tata laksana rumah tangga, yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Sementara itu, Pokja IV berfokus pada kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat, yang menjadi faktor penting dalam menciptakan keluarga yang berkualitas.

Dalam perkembangannya, PKK juga memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan perempuan. PKK menjadi wadah bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kepemimpinan. Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, pengelolaan usaha mikro, serta penyuluhan kesehatan reproduksi, PKK membantu meningkatkan kemandirian perempuan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kesejahteraan terwujudnya keluarga. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan kemasyarakatan, organisasi yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan

untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran 17epre dan lingkungan.

Selain ketiga fungsi utama tersebut, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga memiliki peran tambahan dalam mendukung pemberdayaan berbasis gender. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berupaya untuk mengangkat peran perempuan dalam masyarakat dengan menyediakan pelatihan dan kesempatan yang memungkinkan perempuan untuk lebih mandiri secara ekonomi maupun sosial. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka melalui kegiatan seperti pelatihan wirausaha, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, serta kegiatan kreatif yang berbasis pemberdayaan lokal.

Secara teoritis, konsep peran (role) dapat dijelaskan sebagai seperangkat perilaku, tugas, hak, dan kewajiban yang melekat pada suatu posisi atau status sosial tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana seseorang atau kelompok yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti telah menjalankan suatu peran. Dalam konteks ini, Tim Penggerak PKK sebagai suatu lembaga sosial memiliki kedudukan strategis dalam struktur masyarakat desa, sehingga perannya sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan berbasis keluarga.

Dalam konteks pemberdayaan, teori yang dikemukakan oleh Jim Ife juga relevan untuk menjelaskan peran PKK. Pemberdayaan (empowerment) merupakan proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mengontrol

kehidupan mereka sendiri. PKK berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan ini dengan memberikan akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.

Di tingkat desa, peran PKK semakin terlihat melalui keterlibatannya dalam berbagai program pembangunan berbasis masyarakat, seperti posyandu, bina keluarga balita, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), hingga kegiatan lingkungan seperti penghijauan dan pengelolaan sampah. PKK juga sering menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program prioritas, termasuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Keberhasilan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam melaksanakan peran ini sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- Kemampuan kader: Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola program, mendampingi masyarakat, dan melakukan monitoring serta evaluasi.
- Dukungan pemerintah: Dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan, pendanaan, maupun pembinaan, sangat penting untuk memastikan keberlangsungan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- Partisipasi masyarakat: Masyarakat yang aktif terlibat dalam program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap keberhasilan program.

Selain faktor pendukung, terdapat pula beberapa tantangan yang dihadapi PKK, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan PKK melalui peningkatan kapasitas kader, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan program yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mendorong masyarakat, terutama perempuan, untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan desa. Dengan demikian, PKK menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Selain teori peran secara umum, konsep peran dalam pemberdayaan masyarakat juga dapat dijelaskan melalui pandangan Ife & Tesoriero (2008), yang mengemukakan bahwa seorang pekerja masyarakat (community worker) atau fasilitator memiliki empat peran utama, yaitu peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis. Keempat peran ini sangat relevan dalam menganalisis peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai agen pemberdayaan di tingkat desa.

1. Peran Fasilitatif

Dalam peran fasilitatif, PKK bertindak sebagai pihak yang mempermudah dan mendorong masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan serta menemukan solusi secara mandiri. PKK menciptakan ruang partisipatif melalui kegiatan seperti musyawarah, penyuluhan kelompok, dan diskusi

warga. Peran ini terlihat dalam upaya PKK membangun kesadaran kolektif masyarakat, memperkuat kerja sama, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap program pembangunan desa. Dengan demikian, PKK tidak bersifat dominan, melainkan menjadi pendamping yang memberdayakan masyarakat agar mampu berdiri secara mandiri.

2. Peran Edukatif

Dalam peran edukatif, PKK berfungsi sebagai agen pendidikan nonformal yang memberikan pengetahuan, informasi, dan keterampilan kepada masyarakat. Kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan rumah tangga, pendidikan gizi, serta pengelolaan keuangan keluarga merupakan bentuk nyata dari peran ini. PKK membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya peran edukatif ini, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih rasional dan meningkatkan kualitas hidupnya.

3. Peran Representatif

Dalam peran representatif, PKK berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan, seperti pemerintah desa, instansi terkait, maupun lembaga lainnya. PKK juga berperan sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak eksternal. Peran ini penting terutama dalam memperjuangkan kepentingan kelompok perempuan dan keluarga agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan

pembangunan. Dengan demikian, PKK turut memastikan bahwa suara masyarakat dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

4. Peran Teknis

Dalam peran teknis, PKK memberikan dukungan keterampilan praktis yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan program-program pemberdayaan. Misalnya, pelatihan pembuatan produk usaha rumah tangga, pengelolaan administrasi kelompok, hingga penerapan pola hidup bersih dan sehat. Peran teknis ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kemampuan praktis dalam mengimplementasikan program secara efektif. PKK, melalui kader-kadernya, menjadi sumber pengetahuan teknis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dikaitkan dengan peran PKK di desa, keempat peran menurut Ife & Tesoriero tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. PKK tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi, edukator yang meningkatkan kapasitas masyarakat, representatif yang menyuarakan kepentingan masyarakat, serta teknisi yang memberikan keterampilan praktis.

Dengan mengintegrasikan teori ini, dapat dipahami bahwa keberhasilan PKK dalam pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuannya menjalankan keempat peran tersebut secara seimbang. Apabila salah satu peran tidak berjalan optimal, maka proses pemberdayaan masyarakat juga akan

terhambat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kader PKK menjadi hal yang sangat penting agar seluruh peran tersebut dapat dijalankan secara maksimal.

2.1.4 Desa

Desa merupakan entitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang telah ada sejak lama dalam struktur masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam literatur sosiologi, desa sering dianggap sebagai representasi kehidupan masyarakat agraris dengan pola kehidupan yang cenderung tradisional (Koentjaraningrat, 2002). Menurut Bintarto (1983), desa dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek geografis, sosial-ekonomi, dan administratif.

Menurut Hanif Nurcholis (2005:135-136) dalam Undang-Undang Nomor 22/1999 dan Undang-Undang Nomor 32/2004 merumuskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat 22epre yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 22epres Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak dan otonomi adat sehingga merupakan badan 22epre.

Dan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat 22epre (adat) yang berhak mengatur dan menurus urusan masyarakat

setempat berdasarkan asal usulnya. Menurut buku Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa dan keluaran, Peraturan Pemerintahan tentang Desa pada Pasal 2 ayat 1, Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi 23epres budaya masyarakat setempat. Menurut buku otonomi desa, desa adalah suatu kesatuan masyarakat 23epre yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Desa memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari wilayah perkotaan, yaitu:

- Ketergantungan pada Alam: Sebagian besar penduduk desa bekerja dalam sektor agraris, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan (Soerjono Soekanto, 2003).
- Kehidupan Sosial yang Erat: Masyarakat desa umumnya memiliki hubungan sosial yang erat, ditandai dengan adanya gotong-royong dan solidaritas tinggi (Koentjaraningrat, 2002).
- Struktur Ekonomi Sederhana: Ekonomi desa biasanya berbasis pada usaha mikro, kecil, dan menengah, serta bergantung pada sumber daya lokal.

Desa memiliki fungsi penting dalam pembangunan nasional. Menurut Rigg (1997), desa merupakan basis produksi agraris yang mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, desa juga berperan sebagai pusat kebudayaan lokal yang menjaga tradisi dan nilai-nilai luhur masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan dari bawah (bottom-up development). Hal ini didukung oleh kebijakan Dana Desa yang memberikan kewenangan bagi desa untuk

mengelola anggaran secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (UU No. 6 Tahun 2014). Beberapa strategi pemberdayaan desa meliputi:

- Pengembangan Infrastruktur: Membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas ekonomi.
- Penguatan Kapasitas SDM: Melalui pelatihan dan pendidikan masyarakat desa.
- Pemanfaatan Teknologi: Digitalisasi desa untuk meningkatkan akses informasi dan pemasaran produk lokal (Mardikanto, 2014).
- Pengembangan BUMDes: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal (UU No. 6 Tahun 2014).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Telah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang Peran PKK Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan. Adapun penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini antara lain ;

Pemilihan judul penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. PKK berfungsi sebagai wadah pemberdayaan keluarga yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rumah tangga. Dalam praktiknya, PKK tidak hanya

menjalankan program rutin, tetapi juga berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat lokal.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program PKK belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum maksimalnya koordinasi dalam pelaksanaan program. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peran ideal PKK sebagai agen pemberdayaan masyarakat dengan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, terlihat bahwa fokus penelitian mengenai PKK masih cenderung bersifat parsial. Penelitian oleh Wahyuni et al. (2023) lebih menitikberatkan pada bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan PKK, sedangkan Rumayah (2015) mengkaji pelaksanaan program PKK yang belum berjalan maksimal akibat keterbatasan dana dan luasnya wilayah kerja. Selanjutnya, Wadu et al. (2018) lebih memfokuskan pada faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kesejahteraan keluarga, sementara Meleru et al. (2022) menyoroti aspek efektivitas program PKK dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, Rantung et al. (2017) menekankan pada peran PKK dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami pelaksanaan program PKK, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (research gap) yang masih belum terjawab. Pertama, sebagian besar penelitian hanya mengkaji satu aspek tertentu, seperti pelaksanaan, hambatan, atau efektivitas, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

peran PKK secara menyeluruh. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif dan belum banyak menggunakan pendekatan teoritis yang kuat untuk menganalisis peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga, kajian mengenai kualitas pemberdayaan yang dihasilkan dari program PKK, seperti sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, masih belum banyak dibahas secara mendalam. Keempat, perbedaan karakteristik sosial dan geografis di setiap daerah menyebabkan hasil penelitian sebelumnya tidak dapat digeneralisasikan, sehingga diperlukan penelitian dalam konteks lokasi yang berbeda.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan keterbaruan (novelty) dengan mengkaji peran PKK secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi pelaksanaan program, tetapi juga mencakup fungsi, hambatan, serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoritis yang relevan untuk memperkuat analisis, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran PKK dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada lokasi yang memiliki karakteristik sosial tersendiri, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris baru yang memperkaya kajian mengenai PKK.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mengisi kekosongan dalam kajian akademik, tetapi juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi peningkatan peran PKK dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Tabel 1 penelitian terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Wahyuni et al (2023)	Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Marga Daun Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan	Bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Dauh Puri Marga Tabanan meliputi kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan PKK. Pada bidang pendidikan pemberdayaan dilaksanakan dengan didirikannya Yayasan Margarana yang melayani PAUD dan Taman Kanak-Kanak. Pemberdayaan pada bidang kesehatan dilakukan dengan adanya kegiatan pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang meliputi kegiatan Posyandu Balita, Bumil (Ibu Hamil) dan Kegiatan Posyandu Lansia, serta kegiatan vaksin dan donor darah. Di bidang PKK pemberdayaan dilakukan dengan menanam sayuran, menanam ketela rambat, pelatihan membuat kriping singkong, pemilahan sampah 27 eprese dan arisan PKK rutin setiap bulannya.
2.	Rumayah (2015)	Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau	Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pengetahuan dan Keterampilan dalam pelaksanaan kegiatan belum terlaksana secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana dan luasnya daerah yang harus menjadi tanggung jawab Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Malinau Kota dari desa-desa yang lain, serta kurangnya kinerja dari anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) itu sendiri sehingga perlu ditingkatkan.

3.	Wadu et al (2018)	Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK	Faktor penghambat TP.PKK dalam meningkatkan keterampilan warga negara adalah kesibukan dari masyarakat, pemasaran hasil kegiatan yang belum maksimal, dan keterbatasan dana yang dialami masyarakat untuk mengembangkan hal yang telah diajarkan oleh TP.PKK. Faktor penghambat diatas menjadi kendala utama bagi TP.PKK untuk meningkatkan keterampilan warga negara. Dengan adanya 28epres penghambat diatas dapat dilihat peran TP.PKK untuk meningkatkan keterampilan warga negara belum dapat dilakukan secara optimal. Dengan adanya 28epres penghambat ini, diharapkan masyarakat dan TP.PKK dapat bekerjasama untuk menyelesaikan 28epres penghambat yang dialami sehingga pemenuhan komponen keterampilan warga negara dapat dimiliki oleh masyarakat.
4.	Meleru et al (2022)	Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Dalam aspek menentukan pilihan dilaksanakan proses penentuan program melalui mekanisme yang demokratis dengan membuat sebuah musyawarah untuk menggali aspirasi anggota dan kemudian ditetapkan dalam sebuah program, selain itu penentuan program juga hasil dari musyawarah tersebut berarti sesuai dengan keinginan anggota. Pada aspek ketepatan sasaran dari hasil penelitian terlihat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggota dan belum mampu memberdayakan anggota untuk dapat menjadi lebih baik, program yang ada masih kebanyakan program rutin selain itu program sebenarnya menyasar semua ibu ibu yang ada di desa dan kemudian dirangkul

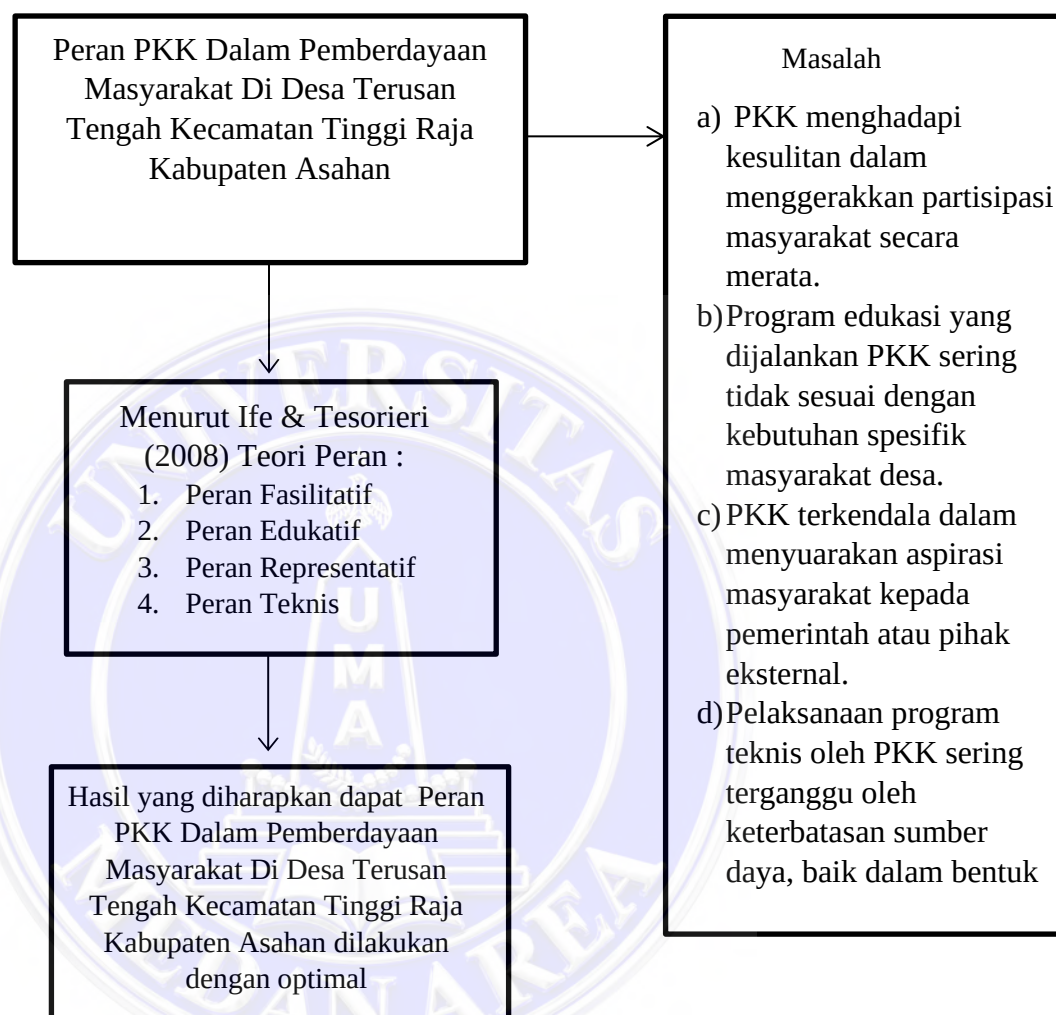
5.	Rantung et al (2017)	Peranan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Ongkau I Kabupaten Minahasa Selatan	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga adalah suatu gerakan yang dibentuk untuk partisipasi menggerakkan masyarakat dan memberdayakan masyarakat guna untuk mewujudkan pembangunan desa. Kedudukan atau posisi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam masyarakat cukup penting, karena Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berusaha untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
----	----------------------	---	---

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep dengan memahami keterkaitan antara beberapa teori, yaitu keterkaitan teori-teori akan membentuk rangkaian yang berkesinambungan.

Kerangka pemikiran, alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan atau fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis. Dalam Sugiyono (2015;91) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai hubungan antara variabel yang disusun teori yang dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Dalam menjawab rumusan masalah, penulis

mengambil eori peran, seperti yang diuraikan oleh Ife & Tesoriero (2008) yaitu peran fasilitatif, peran edukatif, peran 30epresentative, dan peran teknis.



Gambar 1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Bogdan dan Taylor (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melihat kondisi subjek yang diteliti secara alamiah dan apa adanya. Penelitian akan melakukan pengamatan dari yang terjadi pada Peran PKK Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

3.2. LOKASI DAN JADWAL PENELITIAN

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana

penelitian akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-perimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini penelitian diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma, 2015:243). Dalam penelitian ini penulis memilih PKK Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang bersifat akademis maupun empiris. Secara akademis, Desa Terusan Tengah merupakan salah satu desa yang aktif melaksanakan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian dalam mengkaji peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat.

Secara empiris, berdasarkan pengamatan awal, pelaksanaan program PKK di Desa Terusan Tengah menunjukkan adanya dinamika yang menarik untuk diteliti. Di satu sisi, PKK telah menjalankan berbagai kegiatan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya pelaksanaan beberapa program pokok PKK. Kondisi ini menjadikan desa tersebut sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peran PKK dijalankan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selain itu, Desa Terusan Tengah memiliki karakteristik sosial masyarakat yang heterogen serta kondisi geografis yang cukup representatif untuk menggambarkan pelaksanaan program PKK di wilayah pedesaan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan kontekstual terkait implementasi pemberdayaan masyarakat melalui PKK.

Pertimbangan lainnya adalah keterjangkauan lokasi penelitian, baik dari segi akses maupun ketersediaan data dan informan. Hal ini memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh diharapkan lebih akurat dan mendalam.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, PKK Desa Terusan Tengah dipandang sebagai lokasi yang tepat dan relevan untuk mengkaji peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian tentang pemberdayaan berbasis kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 01 September 2025 s/d 30 Nopember 2025. Penelitian melaksanakan penelitian tentang “Peran PKK Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan”.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian. Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti.

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung (Sugiyono, 2016: 300)

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebagai berikut :

2 Informan Kunci

Informan Kunci, merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono, 2019: 25), Maka informan yang peneliti jadikan informan kunci adalah, selaku Sekertaris PKK Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja.

3 Informan utama

Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (Sugiyono, 2019: 25) maka informan utama adalah mereka yang ikut langsung terlibat dalam kegiatan penelitian. Adapun yang menjadi informan utama pegawai TP PKK Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja.

4 Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2019: 25), Maka informan yang memberikan informasi tambahan bagi peneliti adalah masyarakat Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Diantaranya adalah

Tabel 2 Informan Penelitian

No.	NAMA	JABATAN PEKERJAAN
1.	Nauli Manurung, Sos	Kepala Desa Terusan Tengah
2.	Ny. Juli Amita S. Nauli M	Ketua TP PKK Terusan Tengah
3.	Ny. Mariana S. Bambang Purwadi	Sekretaris TP PKK Terusan Tengah

4.	Ny. Farida Suriadi	Ketua Pokja I TP PKK Terusan Tengah
5.	Ny. Kiki Arizona Syaiful Azhari	Ketua Pokja II TP PKK Terusan Tengah
6.	Ny. Siti Rahayu Rusmanto Siagian	Ketua Pokja III TP PKK Terusan Tengah
7.	Ny. Rapika Dewi Maulana	Ketua Pokja IV TP PKK Terusan Tengah

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Catherina Marshall dan Gretchen yang dikutip oleh Andi Prastowo (2010;20) menjelaskan bahwa, metode-metode utama yang digunakan oleh para penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya adalah menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Secara umum, teknik pengumpulan data mencakup berbagai metode seperti observasi (pengamatan), kuesioner (angket), wawancara, dan studi dokumentasi. Pemilihan teknik yang tepat bergantung pada jenis data yang dibutuhkan, tujuan penelitian, serta sumber daya yang tersedia. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian, harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Praktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Menurut Riyanto (2010:96) observasi merupakan metode

pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Disisi lain teknik observasi digunakan sebagai penelitian yang berkenaan dengan perilaku. Dalam penelitian ini kurang lebih dalam waktu satu bulan. Selama penelitian di PKK Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan peneliti mencari tau bagaimana Peran PKK Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dan mencari tau solusi dari permasalahan berikut.

b. Wawancara

Menurut buku metode Penelitian Kualitatif Sugiyono (2012;137) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data wawancara adalah percakapan atau Tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode *Interview*, dimana penelitian mengajukan pertanyaan –pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab langsung oleh masyarakat tersebut.

Atau teknik wawancara adalah melakukan langsung terhadap responden dan informan, yang dilakukan dengan Tanya jawab langsung ke pegawai dan masyarakat. Adapun wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topic tertentu. Selain itu wawancara bisa dikatakan juga sebagai kegiatan mencari data secara mendalam melalui proses percakapan yang direkam oleh penulis dengan informan kunci maupun informan tambahan. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai informan yang sudah ditentukan oleh

penulis dan juga menanyakan apa saja Peran PKK Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam buku menguasai teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif Andi (2010;191) dijelaskan bahwa, Dokumen merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penelitian. Dalam kaitanya dengan penelitian ini, penelitian menggunakan dokumen sebagai sumber data yang mendukung dari sumber data sebelumnya yaitu wawancara dan observasi. Dapat dikatakan juga bahwa dokumen merupakan rekaman yang bias saja bersifat tulisan dan isinya merupakan peristiwa yang sudah maupun berbentuk video.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai keempat alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti ; observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan Peran PKK Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulankesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan

sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

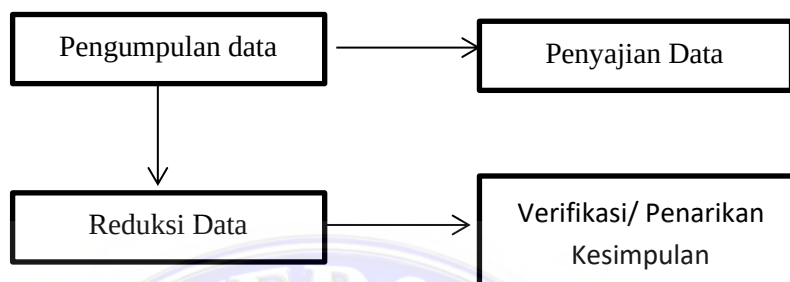
3. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak

hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

3.6. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Terusan Tengah mengacu pada teori peran yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero (2008), yang mencakup empat dimensi utama:

1. Peran fasilitatif: Dimensi ini menekankan pada kemampuan PKK untuk menjadi perantara antara masyarakat dengan berbagai sumber daya yang dapat diakses. PKK membantu masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan solusi, dan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam peran ini, PKK menjadi penghubung penting yang mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan.
2. Peran edukatif: PKK bertanggung jawab memberikan pembelajaran kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi, seperti penyuluhan,

pelatihan, dan seminar. Fokus dari peran edukatif ini adalah meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada secara mandiri. Edukasi yang diberikan mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan pemberdayaan perempuan.

3. Peran representatif: Dalam dimensi ini, PKK berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas, seperti pemerintah daerah atau lembaga non-pemerintah. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan kebutuhan mereka diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan.
4. Peran teknis: PKK memberikan dukungan teknis kepada masyarakat, seperti pelatihan keterampilan teknis, pendampingan dalam pengelolaan usaha mikro, dan bantuan peralatan. Dukungan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka secara efektif dan berkelanjutan. Peran teknis ini juga mencakup implementasi program-program yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Peran-peran tersebut saling melengkapi dalam mendukung tujuan PKK sebagai organisasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Dengan mengadopsi teori Ife dan Tesoriero (2008), PKK mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan, dan penyedia dukungan teknis yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal.

3.6.2 Definisi Operasional

Peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Terusan Tengah dapat diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan nyata yang mencerminkan empat dimensi peran (fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis) yang diadaptasi dari teori Ife & Tesorieri (2008). Setiap peran dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif merujuk pada upaya PKK dalam menjadi penghubung antara masyarakat dengan sumber daya, informasi, atau pihak-pihak eksternal yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam mencapai kemandirian melalui akses yang lebih baik terhadap berbagai program dan layanan.

o Indikator Operasional:

- Jumlah forum atau pertemuan konsultatif yang diselenggarakan oleh PKK.
- Tingkat keberhasilan PKK dalam menghubungkan masyarakat dengan program pemerintah, swasta, atau LSM (contoh: program pengembangan usaha kecil, bantuan pendidikan, atau layanan kesehatan).
- Keberadaan dokumen atau laporan yang menunjukkan koordinasi PKK dengan lembaga eksternal.

o Contoh Aktivitas:

- PKK mengundang dinas terkait untuk menyosialisasikan program bantuan sosial di desa.

- PKK mengorganisasi kelompok tani untuk mengakses bantuan pupuk bersubsidi melalui pemerintah daerah.

2. Peran Edukatif

Peran edukatif melibatkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan budaya. Peran ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

o Indikator Operasional:

- Frekuensi pelatihan, penyuluhan, atau seminar yang diadakan oleh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- Jumlah peserta pelatihan atau kegiatan edukatif yang mengikuti program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- Tingkat perubahan pengetahuan atau keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan (bisa diukur melalui survei atau observasi).

o Contoh Aktivitas:

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mengadakan penyuluhan tentang pola hidup sehat dan gizi keluarga.

- Mengadakan pelatihan kerajinan tangan seperti membuat batik atau produk anyaman untuk menciptakan peluang usaha baru.
- Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini.

3. Peran Representatif

Peran representatif mencakup tugas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk menjadi perwakilan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, atau sektor swasta. Dalam konteks ini, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertindak sebagai advokat dan perantara yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

o Indikator Operasional:

- Jumlah aspirasi atau usulan masyarakat yang disampaikan melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kepada pemerintah atau pihak lain.
- Tingkat keberhasilan advokasi yang dilakukan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendorong kebijakan atau program yang menguntungkan masyarakat.
- Keterlibatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam forum-forum resmi (musyawarah desa, musrenbang, dll.).

o Contoh Aktivitas:

- Ketua PKK desa menghadiri musrenbang desa untuk mengusulkan pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat.
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memperjuangkan pendirian posyandu baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menyampaikan aspirasi kelompok tani kepada dinas pertanian terkait distribusi bibit unggul.

4. Peran Teknis

Peran teknis merujuk pada penyediaan bantuan berupa keterampilan praktis, alat-alat, atau dukungan langsung lainnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya dan mencapai kemandirian ekonomi. Peran ini sering kali bersifat konkret dan langsung memberikan manfaat praktis bagi masyarakat.

o Indikator Operasional:

- Jumlah program pelatihan keterampilan teknis yang diselenggarakan oleh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

- Jenis bantuan teknis atau material yang diberikan kepada masyarakat (contoh: alat produksi, benih tanaman, peralatan memasak).
 - Jumlah masyarakat yang menerima manfaat dari bantuan teknis Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- o Contoh Aktivitas:
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menyediakan pelatihan pembuatan pupuk organik dan memberikan alat-alat pendukungnya kepada petani.
 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mendistribusikan peralatan menjahit kepada ibu-ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha konveksi kecil-kecilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Terusan Tengah memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat desa melalui berbagai kegiatan pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan peran keluarga dan perempuan.
2. Ditinjau dari *Teori Peran Ife dan Tesorieri (2008)*, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Terusan Tengah telah menjalankan:
 - a) **Peran fasilitatif**, dengan menyediakan ruang partisipasi masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan, pembinaan keluarga, dan kegiatan sosial, meskipun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal.
 - b) **Peran edukatif**, melalui penyuluhan dan pembinaan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, ketahanan keluarga, serta ekonomi rumah tangga, namun masih terkendala rendahnya partisipasi sebagian masyarakat.

- c) **Peran representatif**, dengan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan, kepada pemerintah desa, walaupun belum seluruh aspirasi dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan dukungan eksternal.
 - d) **Peran teknis**, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pemberdayaan, yang telah berjalan tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas teknis pengurus.
3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Terusan Tengah telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, namun dampak pemberdayaan belum sepenuhnya merata akibat keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat.
4. Rendahnya partisipasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Terusan Tengah dalam mengikuti lomba-lomba PKK tingkat kabupaten dan provinsi dipengaruhi oleh:
- a) keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung,
 - b) kapasitas teknis dan administrasi pengurus yang belum optimal,
 - c) rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK),
 - d) serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan pihak swasta.
5. Meskipun menghadapi berbagai kendala, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Terusan Tengah bersama pemerintah desa telah melakukan upaya perbaikan secara bertahap melalui

penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas pengurus, dan upaya mendorong partisipasi masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP

PKK) Desa Terusan Tengah

- a) Meningkatkan kapasitas teknis dan administrasi pengurus melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
- b) Memperkuat dokumentasi dan perencanaan program agar lebih siap dalam mengikuti lomba-lomba Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
- c) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

2. Bagi Pemerintah Desa Terusan Tengah

- a) Memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melalui kebijakan desa dan alokasi anggaran yang proporsional.
- b) Memfasilitasi koordinasi antara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mendukung keberlanjutan program.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait

- a) Meningkatkan dukungan berupa pelatihan, pendampingan tenaga ahli, serta bantuan sarana dan prasarana bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) desa.
- b) Mendorong sinergi lintas sektor agar Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) desa lebih siap dan berdaya saing dalam berbagai kegiatan, termasuk lomba Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

4. Bagi Masyarakat Desa Terusan Tengah

- a) Meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- b) Mendukung pelaksanaan program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Mengembangkan penelitian dengan memperluas objek kajian atau menggunakan pendekatan komparatif antar desa.
- b) Mengkaji lebih lanjut dampak jangka panjang program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pembardayaan Pemerintah Desa Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugarto Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Ravika Adimatama.
- Eko Sudarmanto, dkk. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Gomes, Faustno Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- TP, Yansen. 2013. *Gerakan Desa Membangun*. Malang: PT. Danar Wijaya.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Dadi, M. Y. (2018). *Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK*. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 8(1), 62-71.
- Wahyuni, A. A. N. S., & Candrawati, A. A. K. S. (2023). *PERAN PKK DALAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MARGA DAUH PURI KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN*. *BINA CIPTA*, 2(1), 41-52.
- Zubaedi.(2013).*Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zubaedi.(2013).*Pengembangan Masyarakat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*

Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.* Jakarta

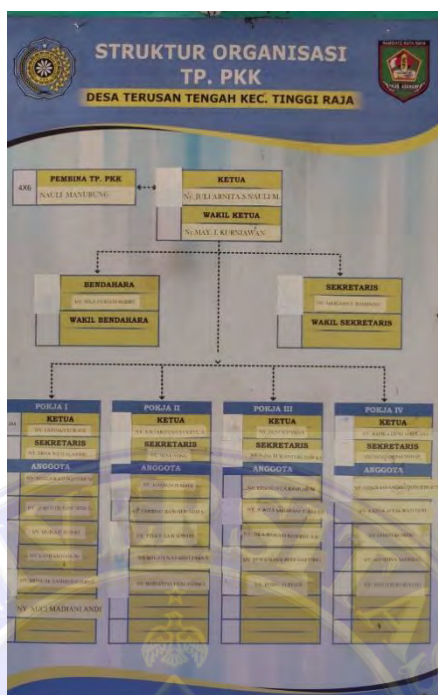
Meleru, J., Pangemanan, F. N., & Sampe, S. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *GOVERNANCE*,2(1).

Rantung, J., Mandey, J., & LONDA, V. (2014). Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Ongkau I Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(5).

Rumayah. (2015). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau. *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol 3, No 2

Trisnawati dan Jatiningsih.(2017). Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, 5 (3).(online).(jurnalmahasiswa.unesa.ac.id), diakses 7 September 2017.

DOKUMENTASI



Gambar 4. Struktur Organisasi TP PKK Desa Terusan Tengah



Gambar 5. Wawancara dengan Ny. Juli Amita S.Nauli M selaku ketua TP PKK Desa Terusan Tengah



Gambar 6. Wawancara dengan Ny. Mariana S. Bambang Purwandi selaku Sekretaris TP PKK Desa Terusan Tengah



Gambar 7. Wawancara dengan Ny. Farida Suriadi selaku Ketua Pokja I TP PKK Desa Terusan Tengah



Gambar 8. Wawancara dengan Ny. Kiki Arizona Syaiful Azhari selaku Ketua Pokja II TP PKK Desa Terusan Tengah



Gambar 9. Wawan acara dengan Ny. Rapika Dewi Maulana Selaku Ketua Pokja III sekaligus Kunjungan ke perkebunan Jambu yang di kelola oleh TP PKK Desa Terusan Tengah



Gambar 10. Wawancara dengan Ny. Siti Rahayu Rusmanto Siagian selaku Ketua Pokja IV TP PKK Desa Terusan Tengah



Gambar 11. Foto Bersama Ketua TP PKK dan Anggota TP PKK Desa Terusan Tengah



Gambar 12. Kegiatan Keterampilan membuat Bunga TP PKK Desa Terusan Tengah



Gambar 13. Kegiatan Posyandu di Desa terusan Tengah



Gambar 14. Praktek Kegiatan Keterampilan Memasak TP PKK Desa Terusan Tengah



Gambar 15. Kegiatan Pertemuan Rutin TP PKK Desa Terusan Tengah yang di hadiri oleh Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ibu Ketua TP PKK Kecamatan Tinggi Raja dan OPD Pembina PKK Kabupaten Asahan



Gambar 16. Kegiatan pengembangan Dasawisma BERDIKARI (Berkebun Dipekarangan Rumah Sendiri)